



MAHKAMAH AGUNG

**PROGRAM KERJA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PENGAWASAN**

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN

MAHKAMAH AGUNG RI

NOMOR : 65 /BP/SK/XII/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROGRAM KERJA
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2022**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan penjabaran rencana strategis 2020-2024 maka perlu disusun program kerja Badan Pengawasan tahun 2022 sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa untuk menyusun program kerja yang berkualitas perlu membentuk tim penyusun program kerja Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan tata Kerja;
 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROGRAM KERJA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TA 2022
- PERTAMA : Menunjuk Pejabat/Pegawai sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Program Kerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Tim penyusun program kerja bertugas menyusun atau mereviu rencana kerja anggaran Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Tim Penyusun Program kerja bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 9 Desember 2021
Plt. Kepala Badan Pengawasan



9 DWIARSO BUDI SANTIARTO ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSWAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH
AGUNG RI

NOMOR : 65 /BP/SK/XII/2021

TANGAL : 9 Desember 2021

No	NAMA	JABATAN	JABATAN TIM
1.	H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.H	Plt. Kepala Badan	Penanggung Jawab
2.	Drs. H. Andi Kurniawan, M.M	Sekretaris Badan	Koordinator
3.	Aviantara, S.H., M.Hum.	Inspektur Wilayah I	Anggota
4.	Sugiyanto, S.H.	Inspektur Wilayah II	Anggota
5.	Dr. H. Mustamar, S.H., M.H.	Inspektur Wilayah III	Anggota
6.	Dr. H. Achmad Zainullah, S.H., M.H.	Inspektur Wilayah IV	Anggota
7.	Dra. Any Dyah Wijayanti	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
8.	Wiwi Ismiyati, S.H., M.H.	Kepala Bagian Umum	Anggota
9.	Sodikin, S.E., S.H., M.H.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
10.	Eko Purwanto, S.T., M.H.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi	Anggota
11.	Muhammad Adzkiya, S.E., M.Acc., C.A.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program & Peny. Anggaran	Anggota
12.	Ferri Taufik Ferdiansyah, S.E., Ak., C.A., M.Ak., C.Fr.A	Auditor Madya	Anggota
13.	Muhammad Anis, S.E., Ak., C.A., M.Ak.	Auditor Madya	Anggota
14.	Imawan Suprpto, S.E.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota
15.	Sukriadi Tanjung, S.Kom	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	VISI, MISI, MOTTO/NILAI, SASARAN, DAN TANTANGAN.....	2
	A. Visi	2
	B. Misi	2
	C. Motto/Nilai	2
	D. Sasaran.....	2
	E. Tantangan	2
BAB III	KONDISI DAN PERMASALAHAN	3
	A. Kondisi	3
	B. Permasalahan.....	4
BAB IV	KEBIJAKAN DAN PROGRAM.....	5
	A. Kebijakan	5
	B. Program	5
BAB V	PROGRAM KERJA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI	
	TAHUN ANGGARAN 2022	6
	A. Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	6
	B. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BaDA Pengawasan Mahkamah Agung.....	13
BAB VI	TANTANGAN KEDEPAN.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

Badan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Fungsi pokok manajemen perlu dilaksanakan untuk menjaga dan mengendalikan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan disemua lingkungan peradilan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang yang meliputi bidang administrasi, organisasi dan finansial .

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap instansi harus menerapkan anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja adalah penyusunan anggaran yang memiliki orientasi dan keterukuran output dan outcome sebagai sarana penilaian indikator keberhasilan. Sejalan dengan hal tersebut peningkatan kinerja Badan Pengawasan adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan *good governance* yang harus dilakukan secara terus menerus dalam rangka menunjang tugas Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, serta melakukan pengawasan terhadap perilaku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan adalah merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung juga meliputi organisasi, administrasi dan finansial Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Dalam program kerja Badan Pengawasan tercantum pembinaan dan koordinasi pengawasan, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberdayakan peranan pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan, serta penanganan pengaduan di wilayah hukumnya dengan maksud agar pengawasan yang dilakukan pengadilan tingkat banding bersinergi dengan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

BAB II VISI, MISI, SASARAN, DAN TANTANGAN

A. Visi

Mewujudkan pengawasan yang mampu mendorong aparat peradilan yang bersih dan berwibawa.

C. Motto/Nilai

Profesional, transparan dan komitmen.

B. Misi

Untuk mencapai visi tersebut perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya
2. Mendorong terciptanya lingkungan peradilan yang bersih dan bebas KKN.

A. Sasaran

1. Tersedianya rencana pengawasan.
2. Tersedianya bahan kebijakan pengawasan.
3. Tersedianya sumber daya pengawas yang berkualitas.
4. Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan yang memadai.
5. Terlaksananya pengawasan melekat dan fungsional.
6. Terpenuhinya pelayanan pengaduan masyarakat.
7. Tersedianya perangkat publikasi kegiatan pengawasan.

B. Tantangan

1. Penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi
2. Persepsi publik terhadap sistem peradilan belum sepenuhnya positif.
3. Keterbatasan sumber daya yang tersedia.
4. Luasnya jangkauan pengawasan dan semakin bertambahnya jumlah satuan kerja pengadilan di Indonesia.
5. Harapan Pimpinan Mahkamah Agung terhadap Badan Pengawasan untuk menjadi motor penggerak perubahan serta jendela Mahkamah Agung sehingga menuntut adanya integritas tinggi, profesionalisme serta kreatif dan komunikatif dalam menyiasati kelemahan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

BAB III KONDISI DAN PERMASALAHAN

A. KONDISI

Sebagai dasar perumusan dan pelaksanaan program pengembangan perbaikan sesuai dengan tuntutan masa depan, maka perlu mengenali dan menganalisa secara mendalam kondisi Badan Pengawasan yaitu :

1. Kelembagaan.

Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 Badan Pengawasan yang dipimpin oleh Kepala Badan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung dengan susunan organisasi yang terdiri satu sekretariat Badan dan empat Inspektorat.

2. Sumber Daya Manusia.

- a. Jumlah Hakim Tinggi Pengawas sampai dengan Desember 2021 berjumlah 46 orang
- b. Jumlah Hakim Yustisial sampai dengan Januari 2021 berjumlah 22 orang.
- c. Tenaga fungsional auditor sampai dengan Januari 2021 berjumlah 30 orang.
- d. Tenaga fungsional auditor kepegawaian sampai dengan Januari 2021 berjumlah 9 orang.
- e. Pejabat eselon III sebanyak 4 orang dan pejabat eselon IV sebanyak 16 orang.
- f. Tenaga fungsional kepegawaian pada Badan Pengawasan berjumlah 2 orang.
- g. Tenaga fungsional pranata komputer berjumlah 3 orang, fungsional pustakawan berjumlah 2 orang, fungsional arsiparis berjumlah 1 orang, sehingga total 6 orang.
- h. Jumlah tenaga staf yang ada sebanyak 20 orang dan tenaga PPNPN 16 orang diantaranya 7 orang untuk pengemudi

3. Sumber Dana.

Anggaran Badan Pengawasan tahun 2022 sesuai SP DIPA- 005.07.1.663136/2022 tanggal 17 November 2021 sebesar **Rp.40.160.741.000**

4. Sarana dan Prasarana.

Untuk mendukung kelancaran Tupoksi Badan Pengawasan perlu ditindaklanjuti dalam pembagian tugas personalia yang bertanggungjawab terhadap hasil pengadaan aplikasi pengawasan, ortala dan umum dan kepegawaian Tahun anggaran 2022 sehingga sistem informasi mendukung pengambilan keputusan pimpinan Badan Pengawasan MA RI.

5. Lingkup Kerja Badan Pengawasan.

Lingkup kerja Badan Pengawasan meliputi Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di semua lingkungan peradilan 917 satuan kerja dengan wilayah yang luas dan sulit dijangkau dan sering menghadapi kendala di bidang transportasi, komunikasi, iklim, cuaca, hambatan-hambatan goeografis, politik, sosial, budaya, dan adat istiadat setempat. Selain itu dengan adanya kebijakan dua DIPA di setiap satker berdampak pada luasnya cakupan pemeriksaan yang mencapai 1820 unit pelaporan.

6. Sasaran pengawasan meliputi: penyelenggaraan peradilan, perilaku hakim dan aparat peradilan, administrasi peradilan, administrasi umum, serta pelayanan publik yang berpotensi menimbulkan resiko bahaya terhadap fisik dan mental.

7. Wajah Peradilan Dewasa ini.

Persepsi publik terhadap integritas dan pelayanan peradilan masih belum maksimal meskipun saat ini peradilan pada empat lingkungan sudah berbenah secara terus menerus melalui peningkatan layanan teknologi informasi, akreditasi dan implementasi zona integritas maupun sistem manajemen anti penyuapan (SMAP).

8. Tantangan Kedepan.

Badan Pengawasan sebagai APIP (aparatus pengawasan intern pemerintah) mempunyai kewenangan serta berkewajiban memberikan kepastian (assurance) dan konsultasi (consulting) yang bersifat independen, obyektif dan profesional, agar memenuhi kualitas dan kemampuan pelayanan publik di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang berdampak pada kepercayaan masyarakat.

B. PERMASALAHAN.

Memperhatikan kesenjangan antara kondisi yang ada dengan yang seharusnya (ideal), maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara untuk mendekati kondisi yang ada dengan yang seharusnya. Untuk itu diperlukan kebijakan dan program kerja yang menyeluruh agar memperkuat sistem, mekanisme dan kinerja Badan Pengawasan yang efisien, efektif dan fleksibel.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROGRAM

A. KEBIJAKAN

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam program Badan Pengawasan dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyusun kebijakan pengawasan sebagai berikut :

1. Menggunakan pendekatan holistik terhadap pengembangan yang diperoleh atas analisis menyeluruh penyebab kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang ideal.
2. Memprioritaskan kelancaran pelaksanaan pengawasan dan strategi pengurangan kesenjangan berbagai komponen baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi kinerja Badan Pengawasan.
3. Merancang tindakan yang memberikan kontribusi dalam peningkatan efisiensi keseluruhan dalam proses pelaksanaan pengawasan.
4. Memperkuat fungsi Badan Pengawasan sebagai Quality Assurance Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya..
5. Melakukan sosialisasi pengawasan ke daerah-daerah terkait integrasi system pengawasan dalam model akreditasi/penjaminan mutu, system penilaian pembangunan zona integritas dan system manajemen anti penyuapan..
6. Mempublikasikan kegiatan pengawasan dan hasil-hasilnya agar diketahui masyarakat melalui teknologi informasi.
7. Melakukan koordinasi, komunikasi dan evaluasi wilayah secara intensif dan sistimatis.
8. Mengefektifitaskan kerjasama antar Instansi
9. Memperbaiki Sistem Perencanaan berbasis Manajemen Risiko.
10. Peningkatan kuantitas SDM Pengawasan dengan menambah jumlah personil Hakim Tinggi dan Auditor serta peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan, bimtek, in house training atau pelatihan di kantor sendiri.
11. Meningkatkan kegiatan yang bersifat consulting kepada Satker yang berada di Mahkamah Agung serta Badan Peradilan di Bawahnya.
12. Melakukan pemeriksaan mendadak (Mistery Shoper).
13. Koordinator Asesor PMPRB.
14. Melaksanakan Penilaian Zona Integritas pada empat lingkungan peradilan.

B. PROGRAM

Kebijakan tersebut diatas dilaksanakan melalui program :

1. Program Penerapan Kepemerintahan yang baik.
2. Program Peningkatan Pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara.
3. Program Peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya.

BAB V
PROGRAM KERJA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI
TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan arahan pembangunan hukum yang telah digariskan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 - 2024, Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada tahun Anggaran 2020 telah melakukan restrukturisasi bahwa satu Eselon I hanya memiliki satu Program yaitu Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :

A. Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan kasus (pengaduan/ Penangan pengaduan masyarakat).

Pada tahun anggaran 2022 diperkirakan Badan Pengawasan akan menangani surat pengaduan ± sejumlah 3050 (tiga ribu lima puluh) surat pengaduan yang akan ditangani dengan pembentukan tim dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung ± sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) pemeriksaan kasus dalam bentuk pemeriksaan lapangan sedangkan 48 (Empat Puluh Delapan) surat pengaduan akan didelegasikan ke Pengadilan Tingkat Banding selebihnya dijawab melalui Surat.

2. Tim Penilaian Internal Zona Integritas Mahkamah Agung RI Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 319B/SEK/SK/IV/2019 tentang pembentukan kelompok kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas serta Tim Penilai Internal (TPI) dilingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya.

Pelaksanaan Penilaian oleh Tim Penilaian Internal (TPI) direncanakan untuk Wilayah I, II, III dan IV pada bulan Mei sampai dengan Desember 2022

No	Inpektur Wilayah	Jumlah Obrik
1.	Wilayah I	43
2.	Wilayah II	56
3.	Wilayah III	32
4.	Wilayah IV	27

3. Pengawasan reguler akan dilaksanakan di beberapa Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia di wilayah I, II, III dan IV dengan obyek pemeriksaan meliputi: Manajemen Peradilan, Administrasi Peradilan, Pelayanan Publik, dan Pelaksanaan Anggaran.

Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler untuk **Wilayah I** direncanakan mulai pada :

Tanggal 7 s.d 11 Februari 2022 sebanyak 15 Satker, terdiri dari:

Propinsi	Pengadilan			
	Umum	Agama	TUN	Militer
Sumut		PA Stabat	PT TUN Medan	
		PA Tebing Tinggi		
Sumbar	PN Payakumbuh	PA Painan		
	PN Bukittingi			

Riau		PA Pekanbaru	PTUN Pekanbaru	
Jambi	PN Jambi			
Bengkulu	PN Bengkulu			
Sumsel		PA Palembang		
Lampung	PN Metro			
	PN Gedong Tataan	PA Tanjung Karang		
Bangka Belitung		PA Pangkal Pinang		

Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler untuk **Wilayah II** direncanakan mulai pada :
Tanggal 24 s.d 28 Januari 2022 dan tanggal 7 s.d 11 Februari 2022 sebanyak 40 Satker,
terdiri dari:

Propinsi	Pengadilan			
	Umum	Agama	TUN	Militer
DKI Jakarta	PT DKI Jakarta	PA Jakarta Timur	PTUN Jakarta	Dilmil Jakarta
	PN Jakarta Timur			Dilmilti Jakarta
	PN Jakarta Barat			Dilmiltama Jakarta
	PN Jakarta Selatan			
	PN Jakarta Utara			
Banten	PN Pandeglang	PA Tigaraksa	PTUN Serang	
	PN PN Serang			
	PN Rangkasbitung			
Jawa Barat	PN Balebandung	PA Tasikmalaya		
	PN Tasikmalaya	PA Kota Tasikmalaya		
	PN Garut			
	PN Cianjur			
	PN Cibinong			
	PN Karawang			
Jawa Tengah	PN Cilacap	PA Cilacap		
	PN Pemasang	PA Pemasang		
	PN Banyumas			
	PN Purbalingga			
	PN Purwokerto			
Jawa Timur	PN Lumajang	PA Pacitan		
	PN Sumenep	PA Ngawi		

	PN Ponorogo			
	PN Blitar			
	PN Magetan			
Denpasar	PN Gianyar		PTUN Denpasar	
	PN Semarapura			

Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler untuk **Wilayah III** direncanakan mulai pada :
Tanggal 7-11 Februari 2022 dan 7-11 Maret 2022 sebanyak 17 Satker, terdiri dari:

Propinsi	Pengadilan			
	Umum	Agama	TUN	Militer
Kal Tim	PN Samarinda	PA Sendawar		Dilmil Balikpapan
Kal Bar	PN Mempawah		PTUN Pontianak	
		PA Putussibau		
		PA Nanga Pinoh		
Kal Sel		PA Banjarmasin		
		PA Kotabaru		
Kal Teng	PN Pangkalan Bun	PA Palangkaraya		
		PA Buntok		
		PA Tamiang Layang		
Sulut		PA Manado		Dilmil III-17 Manado
Sulsel		PA Pare-pare		
		PA Takalar		
Sultra	PN Raha	PA Raha		
Sulteng		PTA Palu		
		PA Kodya Palu		

Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler untuk **Wilayah IV** direncanakan mulai pada :
Tanggal 7 s.d 11 Maret 2022 sebanyak 12 satker, terdiri dari:

Propinsi	Pengadilan Tinggi			
	Umum	Agama	TUN	Militer
Papua		PA Sentani	PTUN Jayapura	Dilmil III-19 Jayapura
		PA Arso		
NTB		PA Girimenang		
		PA Sumbawa Besar		
		PA Selong		
NTT	PN Kupang	PA Kupang		
	PN Ende			
Maluku	PN Tual			
		PTA Ambon		

4. **Monitoring** Laporan Tindak Lanjut LHP Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan :

Pelaksanaan Monitoring untuk **Wilayah I** direncanakan mulai pada: Tanggal 05 September 2022 s.d 16 September 2022 sebanyak 20 Satker, terdiri dari:

Propinsi	Umum	Agama	TUN	Militer
Aceh	PN Calang			
	PN Langsa			
Sumatera Utara		PA Stabat	PT TUN Medan	
		PA Tebing Tinggi		
Sumatera Barat	PN Payakumbuh	PA Painan		
	PN Bukittinggi			
Riau			PTUN Pekanbaru	
		PA Pekanbaru		
Jambi		PA Jambi		
	PN Jambi			
Sumsel		PTA Palembang		
		PA Palembang		
Babel	PA Pangkalpinang			
Bengkulu	PN Bengkulu	PTA Bengkulu		
Lampung	PT Lampung	PA Lampung		
	PN Metro			

Pelaksanaan Monitoring untuk **Wilayah II** direncanakan mulai pada: Tanggal 05 September 2022 s.d 16 September sebanyak 23 Satker, terdiri dari:

Propinsi	Umum	Agama	TUN	Militer
Jawa Barat	PN Balebandung	PA Tasikmalaya		
	PN Cianjur	PA Kota Tasikmalaya		
	PN Tasikmalaya			
	PN Garut			
	PN Cibinong			
	PN Karawang			
Banten	PN Pandeglang	PA Tigaraksa	PTUN Serang	
	PN Rangkasbitung	PA Pandeglang		
DKI Jakarta	PT DKI	PA Jakarta Timur	PTUN Jakarta	Dilmil Jakarta
	PN Jakarta Utara	PTA Jakarta		Dilmilti Jakarta
	PN Jakarta Selatan			Dilmiltama Jakarta
	PN Jakarta Barat			

Pelaksanaan Monitoring untuk **Wilayah III** direncanakan pada: Tanggal 03 Oktober 2022 s.d 14 Oktober 2022 sebanyak 12 Satker, terdiri dari:

Propinsi	Umum	Agama	TUN	Militer
Kaltim	PN Samarinda			Dilmil Balikpapan
Kalbar	PN Pontianak		PTUN Pontianak	
Kalsel		PA Banjarmasin		
Kalteng		PA Palangkaraya		
Sultra		PA Manado		Dilmil Manado
Sulsel		PA Pare-pare		
		PA Takalar		
Sultra	PN Raha			
Sulteng		PTA Palu		

Pelaksanaan Monitoring untuk **Wilayah IV** direncanakan mulai pada: Tanggal 03 Oktober 2022 s.d 14 Oktober 2022 sebanyak 12 Satker, terdiri dari:

Propinsi	Umum	Agama	TUN	Militer
NTB		PA Selong		
		PA Girimenang		
		PA Sumbawa Besar		
NTT	PN Kupang	PA Kupang		
	PN Ende			
Maluku	PN Tual	PTA Ambon		
Papua		PA Arso	PTUN Jayapura	Dilmil Jayapura
		PA Sentani		

5. Pemeriksaan Keuangan/ Reviu

Pelaksanaan Pemeriksaan Reviu direncanakan mulai pada: Tanggal 01 November s.d 30 November 2022

Inspektur Wilayah	Tanggal Pelaksanaan	Satuan Kerja
Wilayah I	01 Desember s.d 30 Desember 2022	1. PN Medan 2. PN Palembang
Wilayah II	01 Desember s.d 30 Desember 2022	1. PN Serang 2. PN Bogor
Wilayah III	01 Desember s.d 30 Desember 2022	1. PN Balikpapan 2. PTUN Kendari
Wilayah IV	01 Desember s.d 30 Desember 2022	1. PTUN Mataram 2. PN Jayapura

5. Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja serta perilaku Aparat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Pelaksanaan Pemeriksaan Audit Kinerja untuk **Wilayah I** direncanakan mulai pada: Tanggal 07 s.d 10 Maret 2022 dan tanggal 04 April s.d 14 April 2022 sebanyak 20 Satker, terdiri dari:

Propinsi	Umum	Agama	TUN	Militer
Aceh	PN Meulaboh	MS Sabang		
	PN Jantho			
Sumatera Utara		PA Binjai		Dilmil Medan
Sumatera Barat		PA Padang		
		PA Pariaman		
		PA Batusangkar		
Pekanbaru	PN Dumai	PA Batam		
Sumsel	PN Prabumulih	PA Kayuagung		
Jambi	PN Muara Bulian	PA Sengeti		
Babel	PN Sungai Liat	PA Sungai Liat		
Bengkulu	PN Arga Makmur		PTUN Bengkulu	
Lampung		PA Menggala		
		PA Gunungsugih		

Pelaksanaan Pemeriksaan Audit Kinerja untuk **Wilayah II** direncanakan mulai pada: Tanggal 04 April s.d 14 April 2022 dan 17 Mei s.d 25 Mei 2022 sebanyak 20 Satker, terdiri dari:

Propinsi	Umum	Agama	TUN	Militer
Banten		PTA Banten		
Jawa Barat	PN Cibadak	PA Bogor		
	PN Sumedang			
	PN Purwakarta			
	PN Cikarang			
Jawa Tengah	PN Sragen	PA Purbalingga		
	PN Brebes			
	PN Rembang			
	PN Kebumen			
	PN Boyolali			
Jawa Timur	PN Malang	PA Ponorogo		
	PN Ngawi			
	PN Nganjuk			
	PN Lumajang			
Bali	PT Denpasar			
	PN Tabanan			
	PN Bangli			

Pelaksanaan Pemeriksaan Audit Kinerja untuk **Wilayah III** direncanakan mulai pada: Tanggal 17 Mei s.d 25 Mei 2022 sebanyak 20 Satker, terdiri dari:

Propinsi	Umum	Agama	TUN	Militer
Kal Bar		PA Sambas		
		PA Mempawah		

Kal Teng	PN Palangkaraya	PTA Palangkaraya		
Kal Sel	PN Batulicin	PA Batulicin		
Kal Tim		PA Tenggara		
	PN Nunukan	PA Nunukan		
Sul Sel	PN Selayar	PA Selayar		
Sulut	PTUN Manado	PTA Manado		
	PN Manado			
Sulteng	PN Luwuk	PA Luwuk		
Sultra	PT Kendari	PTA Kendari		
Gorontalo	PT Gorontalo	PTA Gorontalo		

Pelaksanaan Pemeriksaan Audit Kinerja untuk **Wilayah IV** direncanakan mulai pada: Tanggal 17 Mei s.d 25 Mei 2022 sebanyak 14 Satker, terdiri dari:

Propinsi	Umum	Agama	TUN	Militer
NTB	PN Praya	PA Praya		
	PN Mataram			
	PN Selong			
Maluku	PN Ambon	PA Ambon		
Maluku Utara	PN Soasio	PA Ternate		
Papua	PT Jayapura			
NTT	PN Soe		PTUN Mataram	
	PN Kefamenanu			
	PN Maumere			
	PN Bajawa			

6. Audit Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan Audit Pengadaan Barang dan Jasa direncanakan mulai pada: Tanggal 04 April 2022

Inspektur Wilayah	Tanggal Pelaksanaan	Satuan Kerja
Wilayah I	05 s.d 09 Desember 2022	1. PN Batam 2. PN Sengeti
Wilayah II	05 s.d 09 Desember 2022	PN Purbalingga
Wilayah III	05 s.d 09 Desember 2022	1. PA Lolak 2. PN Wangi-wangi
Wilayah IV	05 s.d 09 Desember 2022	1. PTUN Ambon

7. Pelaksanaan Analisa Kebijakan, Pemeriksaan Pengelolaan Anggaran, Pemeriksaan LK, Reviu RKA-KL dan Reviu RKBMN.

Nama Kegiatan	Inspektur Wilayah	Satuan Kerja
Analisa Kebijakan Reviu Pengelolaan Anggaran Reviu LK Reviu RKA-KL dan Reviu RKBMN	Wilayah II	Bawas
	Wilayah II	BUA
	Wilayah II	Biro Keu
	Wilayah II	Biro Renog, Biro Perlengkapan

B. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung, ini meliputi :

A. Tenaga Pengawas Yang Mendapat Peningkatan Kompetensi Sistem Pengawasan

- a. Pengembangan SDM IT Bawas
Pelaksanaan kegiatan pengembangan SDM IT dilaksanakan pada Semester II
- b. Pengembangan SDM Bawas
Pelaksanaan kegiatan pengembangan SDM bawas meliputi kegiatan :
 - a. Pengembangan SDM Bawas / Revolusi Mental yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2022.
 - b. Audit Kepegawaian yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2022 sebagai berikut:

Inspektur Wilayah	Tanggal Pelaksanaan	Satuan Kerja
Wilayah I	Tanggal 01 s.d 31 Agustus 2022	PT Bangka Belitung
Wilayah II	Tanggal 01 s.d 31 Agustus 2022	PT TUN Surabaya
Wilayah III	Tanggal 01 s.d 31 Agustus 2022	1. PTA Manado 2. PTA Palangkaraya
Wilayah IV	Tanggal 01 s.d 31 Agustus 2022	PT Maluku

- c. Pembinaan Hakim Pengawas Bidang
Pelaksanaan pembinaan Hakim Pengawas Bidang akan dilaksanakan pada bulan Maret dan Mei 2022. Yang akan diikuti sebanyak 100 orang diselenggarakan di :
 - a. Aceh
 - b. Gorontalo
- d. *Aessment Hakim Tinggi dan Hakim Yustisial*
Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan Lembaga PPSDM dan dilaksanakan pada tanggal Minggu IV Juni 2022 dan diikuti seluruh Hakim Tinggi Pengawas Badan Pengawasan MA RI
- e. *Pelantikan Hakim Tinggi/Pejabat Struktural*
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari, Mei dan September 2022.
- f. *Studi Banding Luar Negeri*
Kegiatan Studi Banding LN ke Benua Eropa akan dilaksanaka dalam rentang waktu Maret sd Desember 2022.
- g. Penguatan Sistem Tata Kelola Pengawasan
Kegiatan Penguatan Sistem Tata Kelola Pengawasan yang meliputi :
 - a. Sosialisasi Pengaduan
akan dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli, yang akan diikuti sebanyak 100 orang diselenggarakan di :
 - Propinsi Surabaya
 - Propinsi Medan
 - b. Quality Assurance
akan dilaksanakan pada bulan Februari dan Mei, yang akan diikuti sebanyak 100 orang diselenggarakan di :
 - Propinsi Samarinda
 - Propinsi Jayapura
- h. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)
Pelaksanaan Pemeriksaan Evaluasi LKJiP direncanakan pada:

Inspektur Wilayah	Tanggal Pelaksanaan	Satuan Kerja
Wilayah I	06 Juni s.d 10 Juni 2022	1. PT Padang 2. PT Bengkulu
Wilayah II	06 Juni s.d 10 Juni 2022	1. PT Surabaya 2. PT Bandung 3. PN Bekasi
Wilayah III	06 Juni s.d 10 Juni 2022	1. PT Palangkaraya 2. PTA Palangkaraya
Wilayah IV	06 Juni s.d 10 Juni 2022	1. PT Jayapura

B. Dokumen Perencanaan

- a. Perencanaan Renstra/Renja/RKA-KL
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perencanaan : Rakorbangpus, Trilateral Meeting Pagu Indikatif (Jan sd April 2022)
Penyusunan : Penjabaran Pagu Indikatif dalam Renja dan RKA-KL, Penyesuaian Angka Dasar, Inisiatif Baru, dan Pagu anggaran K/L (Mei sd Juli 2022)
Pembahasan : Penyusunan RKA-KL Alokasi Anggaran, Pembahasan dengan DPR untuk new inisiatif, Penyesuaian New Inisiatif, Penelaahan RKA-KL, Hasil Penelaahan sebagai bahan penyusunan RUU APBN, Penetapan alokasi Anggaran K/L (Agustus sd Okt 2022)
Penetapan : Penyerahan DIPA ke satuan kerja masing-masing (Nop sd Des 2022)

C. Dokumen Pelaporan

- a. *Pengelolaan Administrasi Keuangan dan LPJ Bendahara*
Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.
- b. *Laporan Tahunan Badan Pengawasan MA RI dan Mahkamah Agung RI*
Rapat koordinasi pembahasan awal draft LAPTAH Bulan Agustus sd Desember 2021
- c. *Penyusunan LAKIP dan Evaluasi LAKIP*
Rapat koordinasi pembahasan awal draft LAKIP Bulan Agustus sd Desember 2022
Evaluasi Lakip
- d. Bulan Mei : Penyusunan Draft Awal LHE
Bulan Juni : draf LHE
Bulan Juli : Penyusunan LHE
Bulan Agustus : Penyempurnaan LHE
- e. *Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI*
Pelaksanaan evaluasi RB Mahkamah Agung RI bulan April sd Juni 2022
- f. *Evaluasi Standar Operasional Prosedur, Evaluasi Standar Pelayanan, dan Evaluasi Jabatan*
Pelaksanaan kegiatan ini pada bulan Januari sd Desember 2022
- g. *Evaluasi Hasil Pemeriksaan*
Pelaksanaan kegiatan ini pada bulan Agustus sd September 2022

D. TLHP BPK / Bawas

Kegiatan ini dilakukan berdasarkan hasil temuan dari BPK maupun internal Badan Pengawasan untuk mengetahui adanya temuan yang dilaporkan. Kegiatan ini meliputi monitor TLHP dan Monitoring TLHP yang akan dilakukan pada bulan Maret 2022

E. Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Kegiatan ini disesuaikan dengan permintaan (perintah) pimpinan Mahkamah Agung atau laporan dari Komisi Yudisial terhadap para hakim terindikasi melakukan

penyimpangan kode etik.

F. Layanan Perkantoran

- a. *Pembayaran Gaji dan Tunjangan*
Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan layanan
- b. *Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran*
 - Terawatnya Kendaraan Dinas Roda 4
Kegiatan ini dilaksanakan selama Januari – Desember 2022.
 - Terawatnya Kendaraan Dinas Roda 2
Kegiatan ini dilaksanakan selama Januari – Desember 2022.
 - Terlaksananya Kegiatan Perkantoran
Kegiatan ini dilaksanakan selama Januari – Desember 2022.
 - Terawatnya Kendaraan Dinas Roda 6
Kegiatan ini dilaksanakan selama Januari – Desember 2022.
 - *Kerjasama Antar Instansi Pemerintah*
Kegiatan ini melibatkan instansi MENPAN dan RB, TP 5000, KPK, Komisi Yudisial, Ombudsman, Kementerian Keuangan, Bappenas dan BPKP pada bulan Januari sd Desember 2022.
 - *Terpeliharanya peralatan kantor*
Kegiatan ini dilaksanakan selama Januari – Desember 2022.
 - *Terlaksananya pengiriman surat dinas*
Kegiatan ini dilaksanakan selama Januari – Desember 2022.
 - *Terpeliharanya Jaringan/ Sistem Informasi dan Peralatan IT*
Kegiatan ini dilaksanakan selama Januari – Desember 2022.
 - *Terlaksananya pelaksanaan barang dan jasa*
Kegiatan ini dilaksanakan selama Januari – Desember 2022.
- c. *Sewa mesin fotokopi*
Kegiatan ini dilaksanakan selama Januari – Desember 2022.
- d. *Jamuan rapat/koordinasi/terima tamu/delegasi*
Kegiatan ini dilaksanakan selama Januari – Desember 2022.

G. Layanan Sarana Internal

- a. *Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran*
Tahap persiapan sampai dengan pelaporan dimulai Bulan Februari sd April 2022.
- b. *Pengadaan Peralatan kantor dan Fasilitas Perkantoran*
Tahap persiapan sampai dengan pelaporan dimulai Bulan Mei sd Juli 2022.

BAB VI TANTANGAN KEDEPAN

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah “Fungsi Pengawasan Peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung”.

Tantangan kedepan Badan Pengawasan diantaranya:

1. Badan Pengawasan sebagai APIP (aparatus pengawasan intern pemerintah) mempunyai kewenangan serta berkewajiban memberikan kepastian (assurance) dan konsultasi (consulting) yang bersifat independen, obyektif dan profesional, agar memenuhi kualitas dan kemampuan pelayanan publik di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang berdampak pada kepercayaan masyarakat.
2. Meningkatkan level Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP menuju Level IV.
3. Luasnya jangkauan pengawasan dan semakin bertambahnya jumlah satuan kerja pengadilan di Indonesia.
4. Semakin bertambahnya kegiatan yang dibebankan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai koordinator kegiatan PMPRB Mahkamah Agung RI dan quality assurance pelaksanaan RB di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, tim penilai implementasi zona integritas menuju WBK dan WBBM, dan tim penilai sistem manajemen anti penyuapan.

Program kerja tahun 2022 Badan Pengawasan Mahkamah Agung disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2024 yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Sasaran dan program yang telah ditetapkan, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kerja tahunan (RKT).

Berhasilnya pelaksanaan program kerja tahun 2022 Badan Pengawasan Mahkamah Agung sangat tergantung pada peran aktif aparat pelaksana dan dukungan anggaran dari pemerintah serta pihak-pihak terkait. Akhirnya program kerja tahun 2022 ini dapat dijadikan bahan kajian yang terus disempurnakan untuk bahan perencanaan selanjutnya bagi keberhasilan tugas dan fungsi Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Jakarta, Januari 2022

Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI



DWIARSO BUDI SANTIARTO



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PENGAWASAN
SURAT TUGAS

Nomor : 709 /BP/ST/XII/2021

KEPALA BADAN PENGAWASAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Program Kerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung – RI Tahun Anggaran 2022 dengan ini menugaskan kepada :

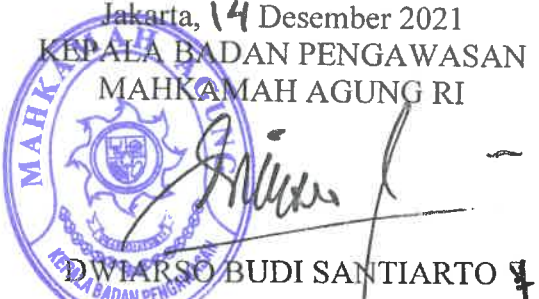
No	Nama Personil	Jabatan
1	H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.H	Plt. Kepala Badan
2	Aviantara, S.H., M.Hum.	Inspektur Wilayah I
3	Sugiyanto, S.H.	Inspektur Wilayah II
4	Dr. H. Mustamar, S.H., M.H.	Inspektur Wilayah III
5	Dr. H. Achmad Zainullah, S.H., M.H.	Inspektur Wilayah IV
6	Drs. H. Andi Kurniawan, M.M	Sekretaris Badan
7	Dr. Drs. H. Sulaeman Abdullah, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Pengawas
8	Aswan Nurcahyo, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Pengawas
9	Pratondo, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Pengawas
10	H. Ujang Abdullah, S.H., M.Si.	Hakim Tinggi Pengawas
11	Kolonel Sus. Syf. Nursiana, S.H.	Hakim Tinggi Pengawas
12	Ade Suherman, S.H., M.H	Hakim Yustisial
13	Horasman Boris Ivan, S.H	Hakim Yustisial
14	Dr. Supandriyo, S.H., M.H.	Hakim Yustisial
15	Mayor CHK. Primafika Syofyan, S.H.	Hakim Yustisial
16	Dr. H. Ahmad Syahrus Sikti, S.H.I., M.H.	Hakim Yustisial
17	Averroes, S.H.	Hakim Yustisial
18	Dra. Any Dyah Wijayanti	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
19	Wiwi Ismiyati, S.H., M.H.	Kepala Bagian Umum
20	Sodikin, S.E., S.H., M.H.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

21	Dra. Yekti Handayani, S.H., M.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Wilayah III
22	Nuzliana Abda, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Wilayah IV
23	Mulyanto, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Pemberhentian dan Pensiun
24	I Gusti Lanang Ngurah Sidemen Putra, S.E.	Kepala Sub Bagian Perlengkapan
25	Eko Purwanto, S.T., M.H.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi
26	Mariana Erka Puteri, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
27	Muhammad Adzkiya, S.E., M.Acc., C.A.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program & Peny. Anggaran
28	Mochtar Luthfi, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
29	Zelfikri Oktiva Lubis, S.T.	Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan
30	Dwi Wulan Indriani, S.Psi.	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan
31	Dwi Era Wahyuni, S.Psi., M.M.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Wilayah I
32	Dewi Nurqolbi Triastuti, S.Psi., M.H.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Pelaporan
33	Muhammad Ulul Ilmi, S.E.	Kepala Sub Bagian Akuntansi
34	Sutrisno, S.H.I.	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian
35	Amarilldo Rizkia, S.Psi.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Wilayah II
36	Sri Kamala Dewi, S.H., M.H.	Auditor Madya
37	Ferri Taufik Ferdiansyah, S.E., Ak., C.A., M.Ak., C.Fr.A	Auditor Madya
38	Muhammad Anis, S.E., Ak., C.A., M.Ak.	Auditor Madya
39	Imam Purnomo, S.E., Ak., C.A.	Auditor Madya
40	Marwendi Putra, S.T., M.M.	Auditor Madya
41	Yusuf, S.E., Ak., C.A., M.A.	Auditor Madya
42	Jhon Richo, S.Psi., M.M.	Auditor Muda
43	Dra. Siti Zainab., M.M.	Auditor Kepegawaian Madya
44	Musa La Haji, S.H.I.	Auditor Kepegawaian Muda
45	Zullvan Sugiantoro, S.T.	Pranata Komputer Muda
46	Narti Sri Sugiarti, S.E	Analisis Kepegawaian Muda
47	Ridwan A.R, S.Kom	Analisis Kepegawaian Pertama
48	Sutikno, S.Kom.	Analisis Tata Usaha

49	Imawan Suprpto, S.E.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
50	Desiyanto	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
51	Novan Pujimahaputra, S.Kom	Penyusun Laporan Keuangan
52	Sukriadi Tanjung, S.Kom	Analisis Perencanaan Anggaran
53	Renatha Arini, S.E.	Analisis Tata Usaha
54	Arga Kurniawan, S.H.	Analisis Tata Usaha
55	Theresia Mona Simsen Banjarnahor, S.St	Analisis Tata Usaha/ CPNS
56	Riry Angelita Gultom, S.Pn.	Analisis Tata Usaha/ CPNS
57	William Parsaulian Simamora, S.Pn.	Analisis Aset Negara/ CPNS
58	Muhammad Iqbal Fanani, S.E.	Penyusun Laporan Keuangan/ CPNS
59	Yan Darmawan, S.H.	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur/ CPNS
60	Yuni Gunarti	Kepala Subdit Anggaran Bidang Hukum Kementerian Keuangan
61	Eko Supriyanto	Kepala Seksi Anggaran Bidang Hukum II Kementerian Keuangan
62	Ekosuma	Analisis Anggaran Ahli Muda Kementerian Keuangan
63	Aris Djoko Widodo	Analisis Anggaran Bidang Hukum Senior Kementerian Keuangan
64	Fiqky Yofhani, S.H.	Bagian Perencanaan dan Keuangan/PTT
65	Hari Pamungkas	PPNPN
66	Irvan Suprayitno	PPNPN
67	Muhammad Ramadhan	PPNPN
68	Andri Limbangan	PPNPN
69	Aris Gunawan Prihartanto	PPNPN
70	Khaliq Ramadhan, S.E.	PPNPN

Untuk mengikuti kegiatan dimaksud terhitung mulai tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan 17 Desember 2021 di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta. Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2021. Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

Jakarta, 14 Desember 2021
 KEPALA BADAN PENGAWASAN
 MAHKAMAH AGUNG RI



DWIARSO BUDI SANTIARTO

